Jurnal Media Hukum

Vol. 10 Nomor 2, September 2022

DOI: 10.59414/jmh.v10i2.512

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan

Marno M Hipan

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia.

*marnohipan@yahoo.com

Article

Kata kunci:

Kriminologi; Tindak Pidana; Penggelapan.

Keywords:

Criminology; Criminal act; Embezzlement

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang teknik dan tata cara pengungkapan tindak pidana penggelapan, serta Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindak Pidana Penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan. Pada tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana. Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).

Abstract

The research aims to examine in depth the techniques and procedures for disclosing criminal acts of embezzlement, as well as to find out the factors that cause someone to commit a crime of embezzlement. The research method used is a normative approach. The normative approach is to examine and analyze laws and regulations by understanding the hierarchy of laws and principles in legislation. In the crime of embezzlement, law enforcers look more at the consequences caused by the perpetrators, not how the perpetrators commit crimes. Law enforcement or policy efforts to prevent and deal with criminal acts of embezzlement, including the field of criminal policy (criminal policy). This criminal policy is also inseparable from broader policies, namely social policy which consists of policies or efforts for law enforcement and policies or efforts for community protection (social defense policy).

PENDAHULUAN

Sekitar abad pertengahan, dikenal adanya peristilahan "*Judicia Dei*" (Keputusan Tuhan) yang kemudian diganti dengan "*Reinigingseed* (sumpah bersih diri), dalam kaitannya mendasari pencarian sebuah kebenaran dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa pemikiran tentang hukum pada saat itu berkiblat pada kekuasaan Tuhan.

Artinya bahwa yang menjadi dasar serta pijakan manusia tentang hukum adalah apa yang ditetapkan oleh Tuhan, termasuk didalamnya keharusan bagi keberadaan hukum positif untuk tidak bertentangan dengan rasio Tuhan. Suasana pemikiran yang berkembang pada abad pertengahan tersebut ternyata mewarnai perkembangan hukum positif kita saat ini. Hal ini dapat kita jumpai pada irah-irah sebuah Putusan Pengadilan yang mewajibkan untuk mencantumkan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Kemudian, pada permulaan abad ke XIII untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan apakah seseorang itu telah melakukan tindak pidana atau tidak, didasarkan pada pengakuan. Akibatnya dengan pemahaman yang sedemikian ini, jelas membuka kemungkinan bagi pihak-pihak tertentu untuk memaksakan kehendaknya kepada seseorang agar mengakui apa yang telah diperbuatnya. Namun falsafah pencarian kebenaran berdasarkan pengakuan ini pun perlahan mulai ditinggalkan pada akhir abad ke XVIII. Masa pada akhir abad ke XVIII sering dikenal sebagai masa kebangkitan rasio manusia, hal mana pencarian sebuah kebenaran mesti didasarkan pada dan dengan menggunakan ilmu pengetahuan.

Upaya penegakkan hukum yang senantiasa dilaksanakan saat ini adalah merupakan serangkaian upaya didalam mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi warga masyarakat, baik perorangan maupun kolegal. Dalam pandangan *aliran positivism* yang menempatkan hukum sebagai sebuah perintah dari penguasa ataupun seperangkat aturan tertulis serta keputusan hakim (pengadilan), maka nilai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan haruslah mengejawantah dalam peraturan tertulis ataupun keputusan hakim (pengadilan) tersebut. Bahwa dari aspek hukum pidana yang merupakan bagian dari bentuk hukum publik, maka nilai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan adalah dapat nyata adanya apabila pelaku dari sebuah kejahatan atau pelanggaran mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berbicara mengenai kejahatan, pengertian kejahatan dapat diartikan secara kriminologi dan secara yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologi yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari aturanaturan atau norma dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kejahatan dalam arti Yuridis yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari ketentuanketentuan hukum pidana.¹

¹Martinha Dos Santos, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini, "KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN KENDARAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG," E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Volume 4, no. No 2 (2021): hlm 265.

Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat.²

Namunpun demikian, dari serangkaian permasalahan hukum, yang kerap terjadi saat ini, yang banyak menarik perhatian adalah menyangkut faktor-faktor penyebab dari serangkaian Tindak Pidana Penggelapan.

Sedemikian menariknya permasalahan ini, maka penulis ingin melakukan pengkajiannya secara mendalam tentang teknik dan tata cara pengungkapan tindak pidana tersebut, serta Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindak Pidana Penggelapan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif analisis yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan.³

PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana.yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum),oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁴

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab musabab terjadinya kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan definisi tersebut tidak dimaksudkan agar orang lain mempelajari cara berbuat kejahatan. Akan tetapi untuk mempelajari suatu tindak kejahatan secara ilmiah berdasarkan keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang

²Aulia Putri Fadhila, "Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, no. No 2 (2021): hlm 282.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.96.

⁴Yudha Tri Sasongko, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN (Studi DiWilayah Hukum Polres Trenggalek)," *Mizan:Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 (2020): hlm 22, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1051/835>.

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Selanjutnya dirumuskan sebuah gagasan solusi guna menanggulangnya.⁵

Plato melihat pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sebagai suatu penyakit dalam bagian rasional dari jiwa manusia oleh karena tidak mengetahui dan tidak mengenal akan keutamaan atau kebajikan pokok yang harus dicapai dan dimilikinya dalam kehidupannya. Jadi hukuman haruslah merupakan suatu obat yang harus sanggup menyembuhkan penyakit yang diidap oleh si terhukum itu.⁶

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*). Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, hanya frekuensi kejahatan ini dialami oleh masyarakat yang peluangnya lebih besar. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penggelapan.

Berkaitan dengan proses pembuktian oleh penegak hukum maka tindak pidana penggelapan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai dan menggelapkan sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Pada tindak pidana penggelapan unsur-unsur tersebut tidak ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penggelapan biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penggelapan dilihat dari efek yang di timbulkan setelah terjadinya tindak pidana penggelapan. Pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan tidak difokuskan pada modusnya akan tetapi pada unsur-unsur pasalnya yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah.

Dalam tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana. Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih

⁵Laila Mamluchah and Nafi' Mubarak, "PENINGKATAN ANGKA KEJAHATAN PENCURIAN PADA MASA PANDEMI DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 6, no. No. 1 (2020): hlm 6, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037/763>.

⁶J.H. RAPAR, *FILSAFAT POLITIK PLATO*, cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).

luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan hipnotis (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concerto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence.

Berkaitan dengan upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan bahwa pada dasarnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berpedoman pada KUHP. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dilakukan secara tegas. Secara teoretis peneliti menganalisis bahwa upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) sebagai pelaksanaan dari KUHP, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concerto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence. Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan digunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan secara global, maka upaya non penal merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, ini disebabkan adanya keterbatasan upaya penal, sehingga upaya non penal sangatlah penting dalam upaya penal itu sendiri. Langkah-langkah signifikan telah diambil oleh penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana penggelapan adalah lebih bersikap pro-aktif terhadap masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan.

Upaya non penal yang dilakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan penegakan hukum, koordinasi dengan sejumlah Tokoh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres dan Polsek berkoordinasi dengan Tokoh masyarakat adalah bentuk upaya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian). Tindak pidana penggelapan tidak terlepas dari masalah pengawasan aktivitas kelompok-kelompok dalam masyarakat. Makna dari pengawasan mempunyai pengertian yang luas dan mengandung pengertian yang positif.

Pengawasan berarti juga proses pengamatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku. Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam hal ini secara preventif dilaksanakan sedini mungkin supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melihat fakta kasus-kasus tindak pidana penggelapan.

System pengawasan aktivitas masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penggelapan masih kurang berjalan optimal. Peneliti menganalisis bahwa penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dengan upaya preventif dilakukan dengan pengawasan aktivitas kelompok yang mengarah pada tindak pidana namun hal ini masih kurang berjalan optimal karena berbagai faktor. Dalam penegakan hukum pidana terhadap aktivitas masyarakat yang mengarah pada tindak pidana perusakan kendaraan secara preventif diadakan pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antara instansi yang terkait dalam rangka pengawasan aktivitas oknum kelompok masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penggelapan, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Penegakan Hukum Secara penal (*Represif*) terhadap tindak pidana penggelapan Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam tindak pidana penggelapan. Upaya penal penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya hukum dengan jalur penal menitikbertakan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara seperti tindak pidana penggelapan dilakukan melalui proses peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa kasus-kasus tindak pidana penggelapan menjadi bukti begitu pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif. Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan secara represif dilakukan sesudah terjadinya atau adanya tindak pidana. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 372 KUHP. Penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 penegakan hukum dan

penanggulangan kejahatan di atas, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*).

Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya penal dengan menerapkan hukuman pidana formal (Ultimum Remidium) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 372 KUHP. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui pendekatan penal dilakukan dengan cara upaya hukum.

Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harus dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan perlu menjadi objek kajian bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Sebagai bentuk penegakan hukum tindak pidana penggelapan maka diperlukan koordinasi dari masyarakat dengan aparat penegak hukum, karena konsep dari perwujudan penegakan hukum yang terpadu pada hakekatnya merupakan penyerasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan

Terkait mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan pada dasarnya faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah sebuah kondisi yang mana mengharuskan seseorang tersebut melakukannya dikarenakan persoalan yang menyangkut kebutuhan hidup yang mendesak dari keadaan tersebut mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan dari hasil penggelapan tersebut. Namun kalau kita melihat fenomena yang terjadi dilapangan persoalan itu sudah hal yang lumrah bagi setiap pelaku tindak pidana penggelapan mengapa demikian, karena para pelaku sudah tidak peduli dengan adanya aturan hukum yang berlaku tentang tindak pidana penggelapan sehingga mereka lebih mementingkan keuntungan yang instan dan keuntungan yang besar demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Terkait mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan pada dasarnya faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah sebuah kondisi yang mana mengharuskan seseorang tersebut melakukannya dikarenakan persoalan yang menyangkut kebutuhan hidup yang mendesak dari keadaan tersebut mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan dari hasil penggelapan tersebut. Namun kalau kita melihat fenomena yang terjadi dilapangan persoalan itu sudah hal yang lumrah bagi setiap pelaku tindak pidana penggelapan mengapa demikian, karna para pelaku sudah tidak peduli dengan adanya aturan hukum yang berlaku tentang tindak pidana penggelapan sehingganya mereka lebih mementingkan keuntungan yang instan dan keuntungan yang besar demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan uraian singkat diatas tentang faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dapat dilihat dari segi kondisi keadaan yang menyangkut kebutuhan hidup sehingga seseorang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang instan tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dan lebih mengesampingkan bentuk pelanggaran hukum yang telah ditetapkan, dibawah ini ada beberapa penjelasan yang lebih jelasnya membahas tentang Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan sebagai berikut :

1. Faktor Intern

- a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. "tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

- b. Faktor Kepribadian

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula

penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam, Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan tindak pidana penggelapan. Demi memenuhi kebutuhan Hidup, seseorang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut tanpa memikirkan efek dari perbuatannya tersebut.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana penggelapan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya suatu penggelapan, maka di suatu waktu seseorang juga akan melakukan tindak pidana penggelapan tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (penggelapan). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai menggelapkan suatu barang. Untuk itu fungsi peranan Orang tua sangat penting dalam hal bertanggungjawab atas mendidik dan memberikan suatu masukan yang terbaik menyangkut perilaku seseorang, ada pepatah mengatakan bahwa "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya" oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan.

c. Faktor Penegakkan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku tindak pidana penggelapan tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan tindak pidana penggelapannya kembali. Penerapan

hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara.

d. Faktor Perkembangan Global

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan suatu tindak pidana penggelapan, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang. Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri.

Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat.

KESIMPULAN

Dalam tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana. Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan hipnotis (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana).

REFERENSI

- Fadhila, Aulia Putri. "Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, no. No 2 (2021): hlm 282.
- Mamluchah, Laila, and Nafi' Mubarak. "PENINGKATAN ANGKA KEJAHATAN PENCURIAN PADA MASA PANDEMI DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 6, no. No. 1 (2020): hlm 6. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037/763>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- RAPAR, J.H. *FILSAFAT POLITIK PLATO*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Santos, Martinha Dos, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini. "KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 4, no. No 2 (2021): hlm 265.
- Sasongko, Yudha Tri. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN (Studi DiWilayah Hukum Polres Trenggalek)." *Mizan:Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 (2020): hlm 22. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1051/835>.